Menakar Peran Parpol dan Koalisi DALAM PEMILUKADA

Berkaca pada Pemilukada DKI Jakarta yang telah selesai beberapa waktu yang lalu dan memunculkan figur baru yang akan memimpin ibu kota setelah mengalahkan calon "incumbent" yang didukung banyak koalisi parpol. Terdapat beberapa gejala yang dapat dijadikan kajian bagi perkembangan demokrasi di republik ini. Walaupun masih terlalu dini menilai Pemilukada DKI akan menjadi *role model* pemilukada lain di daerah. Namun banyak sekali kita temukan hal hal baru yang berpotensi "menjalar" ke daerah lain di Indonesia tidak terkecuali Sumatera Selatan.

Oleh
Zailani Surya Marpaung
Dosen FISIP Universitas Sriwijaya

SAAT ini banyak pengamat di media mengatakan kemenangan Jokowi-Ahok adalah "Koalisi Rakyat mengalahkan Koalisi Partai" namun penulis kurang sependapat karena Jokowi-Ahok bukanlah calon gubernur independen melainkan diusung oleh 2 partai (PDIP dan Gerindra). Mungkin *Statemen* yang lebih tepat adalah kekuatan figur yang dianggap sebagai sosok yang sederhana, ramah, jujur, bersih dan merakyat dan menutupi kekurangan akan "kecilnya" partai pendukungnya mengalahkan kekuatan besar dan dianggap publik mengecewakan dan didukung banyak koalisi partai besar.

Beberapa hal yang berpotensi menjadi tren dan tidak tertutup kemungkinan terjadi di Sumatera Selatan adalah saat ini terjadi kecenderungan menipisnya peran parpol termasuk koalisi parpol dalam menentukan kemenangan seorang calon. Saat ini terdapat kecenderungan pergeseran nilai pemilih, Parpol termasuk koalisi parpol saat ini terkesan hanya sebagai perahu pengantar bagi calon untuk memenuhi syarat pencalonan dan maju dalam ajang pemilihan namun yang paling penting dan menentukan kemenangan seorang calon adalah dukungan riil dari publik di akar rumput. koalisi parpol besar pun ternyata tidak menjadi kekuatan nyata bagi kemenangan kandidat. Dan dibanyak pemilukada terkadang koalisi parpol hanya menjadi hiasan belaka dan tak menjamin kemenangan calon.

Saat ini sedang terjadi sebuah gejala bahwa instruksi partai tidak lagi dimaknai sebagai sebuah perintah wajib oleh sebagian pendukung dan simpatisan parpol. Tanpa bermaksud merendahkan parpol, karena menurut saya parpol tetap merupakan bagian terpenting dalam proses politik dan demokrasi. Namun kecenderungan menurunnya peran parpol termasuk Koalisi parpol dalam pemilukada adalah sesuatu fenomena yang mau tidak mau harus dicermati.

Ketidakpercayaan publik terhadap partai politik akhir akhir ini berada pada titik nadir. Berdasarkan survei yang dilakukan Centre of Strategic and International Studies (CSIS) pada 16-24 Januari 2012 lalu, diperoleh hasil 87,4 persen publik tidak lagi percaya kepada partai politik, Pada akhir tahun lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik menurun drastis, hanya tinggal 23,4 persen saja. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab, diantaranya saat ini partai politik yang sering inkonsisten dalam mendukung seorang calon. Partai politik saat ini dianggap sebagai organisasi yang hanya memberikan harapan tetapi minim menjadi kenyataan, banyak parpol tidak memiliki idealisme yang jelas dan cenderung mengutamakan kepentingan partai politik ketimbang kepentingan publik. Ini diperparah dengan ketidakmampuan parpol mengimplementasikan komitmennya pada publik dan membuat publik trauma dengan janji-janji surga yang dilontarkan partai politik. Hingga pada akhirnya janji partai politik diidentikkan dengan suatu kebohongan.

Di tengah sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, ketidakpercayaan terhadap partai politik ini menjadi masalah tersendiri. Pasalnya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia "mendewakan" adanya sistem kepartaian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Elmer Eric Schattschneider dalam karyanya yang monumental *Party Government* tahun 1942 *"Political parties created democracy"*. Ini menunjukkan bahwa posisi dan peranan partai politik sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi. Namun yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa pemilukada di Indonesia jelas adalah sebuah ironi. Yang bisa dilakukan parpol agar ironi ini tidak berlanjut dan kembali mendapat citra positif dan simpati dari publik adalah instrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan kinerja, dan terpenting bersihkan parpol dari sifat sifat korup. Saat ini publik sudah cerdas dan bisa membedakan, mana parpol yang kotor dan parpol yang bersih serta memiliki komitmen besar bagi publik.

Imbas dari sikap publik tersebut diatas adalah bisa saja terjadi setiap calon yang ingin maju dalam pemilukada saat ini kemenangan tidak mesti tergantung dari parpol atau koalisi parpol. Banyak hal yang bisa dilakukan calon termasuk calon independen untuk merebut dan meraih simpati publik. Walopun memang fakta yang terjadi selama ini hanya segelintir calon dari independen yang bisa memenang pemilukada (salah satu contoh Jonas Salean, wali kota Kupang). Namun bukan hal mustahil di masa depan hal tersebut akan berubah. Besar kemungkinan publik mengalihkan rasa kepercayaannya kepada sosok.

Tren penokohan pribadi cenderung menguat dibanding tren pencitraan parpol termasuk koalisi parpol. Bahkan terdapat kecenderungan di mata publik koalisi parpol terkesan sombong dan arogan. elit koalisi parpol mengidentikkan banyaknya partai pendukung berkorelasi positif dengan banyaknya massa yang juga akan mendukung, namun kenyataannya belum tentu

Koalisi gemuk dalam mendukung salah satu calon dalam pemilukada sah-sah saja dilakukan namun tetap kemenangan ditentukan oleh publik. Fungsi utama partai politik adalah mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi yang mereka tetapkan dan bermuara pada keberpihakan kepada publik. Sedangkan, tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan simpati publik. Artinya, kekuasaan yang diperoleh partai politik adalah karena adanya legitimasi publik melalui sebuah mekanisme pemilihan umum. Jika kemudian koalisi besar partai politik yang mendukung seorang calon bukan berdasarkan pada keberpihakan pada publik, tentu pasangan calon yang didukung oleh parpol maupun koalisi parpol tersebut akan sulit mendapatkan simpati publik.

Jika tidak ingin mengalami kekalahan, saat ini sangat penting bagi parpol untuk mendukung seorang calon bukan berdasar nilai transaksional ataupun *deal* politik yang harus diberikan calon, tapi basis dukungan parpol termasuk koalisi parpol sebaiknya berpusat pada visi dan figur sang calon dimata publik. Visi jelas yang terkonsep sistematis dan dijabarkan dalam rencana aksi yang dinamis serta di-*publish* dalam kemasan yang baik kepada publik baik itu melalui media, baliho, atau sosialisasi langsung yang mendatangi warga akan menimbulkan kesan tersendiri bagi publik. Kemudian sikap *low profile, style* sederhana, *performance* fisik yang komunikatif, jauh dari karakter *"Jaim"* (jaga image), dan jauh dari gaya kepemimpinan yang palsu yang seolah-olah bersuara populis, tapi realitasnya berperilaku elitis, akan jauh menarik simpati publik daripada calon yang berlawanan dari karakter seperti diatas. (*/ce3)

Kode Fakultas | 0
Kode PS/Bagian | 8
Kode Publikasi | 0
Kode Penulis | 1
Tahun Publikasi | 2012
Kode Sumber Tulisan | 0
Nomor urut Publikasi dari Fakultas | 2
Nomor | 0892